

## **ABSTRAK**

Ma'idatul Husna, NIM 1712143046, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pendidikan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hukum Islam.

Penelitian ini di latar belakang oleh pendidikan anak penyandang disabilitas yang di lihat bahwa anak penyandang disabilitas masih rentan terhadap lingkungannya dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ketidaksaman perolehan pendidikan bagi anak normal dan penyandang disabilitas berbeda, jadi timbul rasa tidak percaya diri kepada mereka. Hak pendidikan penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka aturan tersebut harus di laksanakan, bukan hanya undang-undang saja yang mengatur, tetapi hukum Islam juga.

Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan tentang hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program-program tentang pendidikan di Kabupaten Blitar, 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan penyandang disabilitas, 4) Bagaimana hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar, 2) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program-program tentang pendidikan di Kabupaten Blitar menurut Hukum Islam. 3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan penyandang disabilitas. 4) Untuk mengetahui hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 dalam prespektif Hukum Islam.

Metode yang di gunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan datanya ialah dengan melakukan suatu pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan penelaahan seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, fakta-fakta pengamatan (observasi), dan dokumenter yang tersedia kemudian reduksi data lalu yang terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berupaya dalam memenuhi sistem pendidikan penyandang disabilitas. Tetapi masih ada peraturan yang tidak di terapkan dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas yang ada dalam Undang-Undang RI No. 8

Tentang Penyandang Disabilitas. Aturan yang tidak di terapkan ialah: belum terpenuhinya fasilitas pendidikan pada masing-masing anak penyandang disabilitas, belum terpenuhinya akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas, belum terpenuhinya pendampingan pada masing-masing anak penyandang disabilitas di Sekolah dan hanya seorang guru yang ada. 2) Program kerja dari Cabang Dinas Pendidikan untuk pendidikan anak penyandang disabilitas ialah: peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, mengadakan pelatihan untuk Kepala Sekolah dan guru, managerial sekolah, sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas. Dari beberapa program kerja tersebut, program kerja yang masih belum terpenuhi ialah pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas. Misalnya tuna rungu yang fasilitas untuk mereka harus bergantian. Hal tersebut karena kurangnya dana untuk mempoeh alat tersebut. 3) Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan adalah dengan berbagai cara. Salah satu yang menjadi prioritas adalah dengan me rehabilitasi penyandang disabilitas. Misalnya masalah kemandirian, pihak Dinas Sosial mengadakan pelatihan-pelatihan agar penyandang disabilitas jadi lebih mandiri dan berguna di lingkungannya. Selain pelatihan, Dinas Sosial memberikan bantuan seperti uang, sembako, serta alat bantu untuk mereka. 4) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menurut hukum Islam sudah baik sudah sesuai. Pemerintah dalam membuat Undang-Undang sudah sangat jelas dan rinci. Tetapi dalam realita terlihat belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tetapi bukan serta merta itu kesalahan dari pemerintah saja, di dalam undang-undang juga terdapat peraturan tentang peran masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan penuh dalam hal memberikan perlindungan serta hak-hak penyandang disabilitas tanpa adanya deskriminasi. Karena dalam hukum Islam, manusia di pandang sama tanpa adanya perbedaan.

## ABSTRACT

Ma'idatul Husna, NIM 1712143046, Right of Education for Persons with Disabilities According to RI Law no. 8 Year 2016 About Persons with Disabilities In Islamic Law Perspective, Department of Islamic Family Law, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor: Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

Keywords: Persons with Disabilities, Education, Law RI No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Islamic Law.

The study is in the background of the education of children with disabilities who see that children with disabilities are still vulnerable to their environment and have difficulty interacting with others. In addition, the dissonance of educational attainment for normal children and persons with disabilities is different, so there is a lack of confidence in them. The right to education of persons with disabilities is regulated in RI's Law no. 8 Year 2016 on Persons with Disabilities, then the rules must be implemented, not only the law that regulates, but Islamic law as well.

Of the problems, the focus of this research is: 1) How the implementation of the right of education of persons with disabilities according to RI Law No. Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities in Blitar District, 2) How to fulfill the rights of PwDs through education programs in Blitar District, 3) How the Blitar District Government's efforts to provide protection for PwDs, 4) How are the rights of PwDs RI No. 8 of 2016 in the perspective of Islamic Law. The objectives of this research are: 1) To know the right of education of PwDs according to RI Law no. 8 Year 2016 on Persons with Disabilities in Blitar District, 2) To find out how the fulfillment of the rights of persons with disabilities through education programs in Blitar Regency according to Islamic Law. 3) To know the efforts of Blitar District Government to provide protection for PwDs. 4) To know the rights of PwDs according to RI Law. 8 of 2016 in the perspective of Islamic Law.

The method used for this research is qualitative method. And the technique of data collection is by doing an observation, interview and documentation. While the technique of data analysis using the study of all data obtained from various sources, namely from interviews, observation facts (observation), and documentaries available and then last data reduction withdrawal of conclusions.

The results of this study indicate that: 1) Blitar District Government has tried to fulfill the education system of PwDs. But there are still regulations that are not applied in fulfilling the right of education of PwDs that exist in RI Law no. 8 About Persons with Disabilities. Rules that are not implemented are: the unfulfilled educational facilities in each child with disabilities, unfulfilled decent accommodation for children with disabilities, unemployment in each child with disability in Sekolah and only one teacher. 2) The work program of the

Education Office Branch for the education of children with disabilities is: improving the quality of education, improving the performance of principals and teachers in the learning process, conducting training for principals and teachers, managerial schools, facilities and infrastructure School Special, provision of scholarships for children with disabilities who are schools in Special School (SLB), providing learning facilities for each person with disabilities. Of the several work programs, work programs that are still not fulfilled is the provision of learning facilities for each person with disability. For example the hearing impaired facility for those hars bergantia. This is due to lack of funding for the tools. 3) The Blitar District Government's efforts to provide protection are in various ways. One of the priorities is to rehabilitate people with disabilities. For example the problem of independence, the Department of Social Affairs held training so that people with disabilities become more independent and beguna in the environment. In addition to training, the Department of Social Affairs provides assistance such as money, groceries, and tools for them. 4) Law RI no. 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities according to Islamic law is already appropriate. The government in making the Act has been very clear and detailed. But in reality looks not maximal in its implementation. But not necessarily the fault of the government alone, in the law there are also rules about the role of society. So the community also plays a full role in providing protection and the rights of people with disabilities without any discrimination. Because in Islamic law, people are viewed in the same way without any difference.